Manajemen-Diri Yugoslavia

Daniel Jakopovich

Enam puluh tahun yang lalu, Majelis Federal Yugoslavia meresmikan metode manajemen-diri pekerja. Eksperimen Yugoslavia merupakan tambang emas pengalaman; upaya jangka panjang yang paling komprehensif untuk mendirikan pemerintahan sendiri yang populer dalam lintasan waktu sejarah. Dengan demikian, analisisnya adalah titik awal yang sangat berguna untuk masa depan: karena berguna untuk belajar dari aspek-aspek positif pengalaman ini, juga baik untuk belajar dari kesalahan dan keterbatasan Yugoslavia.

Profesor Stipe Šuvar dengan lucu menggambarkan pengalaman Yugoslavia, sesuai dengan realitas material dan budayanya yang terbelakang, sebagai bentuk pemerintahan sendiri “para penggembala”. Sekitar 75% populasi Yugoslavia adalah petani sebelum Perang Dunia Kedua. Seorang komunis terkemuka dan mungkin satu-satunya arsitek terpenting dari sistem "pemerintahan sendiri" Yugoslavia, Edvard Kardelj, mencatat bahwa produksi listrik Yugoslavia sebelum perang adalah 59 kali di bawah rata-rata Eropa.

Dalam hal kelemahan kekuatan “subjektif”, Partai Komunis Yugoslavia adalah ilegal dan berada di bawah tanah selama lebih dari dua puluh tahun, sejak 1920 hingga 1945. Hal ini memperkuat pola-pola yang tidak demokratis, hiper-sentralis dan hierarkis serta menghalangi perkembangan terbuka pergerakan tenaga kerja Yugoslavia. Penduduk tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam perjuangan emansipasi diri.

Tidak adanya kepemilikan - kepercayaan diri yang diperlukan sebagai kebutuhan mendasar; kesadaran kelas, tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan budaya politik yang demokratis. Kuatnya praktik Stalinis di Partai Komunis, khususnya sebelum perpecahannya dengan Stalin, jelas tidak membantu dalam hal ini.

Jalan Menuju Inovasi

Beberapa telah mengidentifikasi asal-usul pembangunan partisipatif Yugoslavia dalam komite anti-fasis selama perang itu sendiri. Ini dibentuk pada tahun 1941 sebagai organ kekuasaan ganda dan ekspresi inisiatif anti-fasis otonom di Yugoslavia. Komunis terkemuka seperti Kardelj dan Moša Pijade kemudian menafsirkan ulang komite anti-fasis ini sebagai bentuk pertama dari jalur independen dan non-Stalinis Yugoslavia.

Pada kenyataannya, hanya setelah perpecahan bersejarah dengan Uni Soviet pada tahun 1948 jalan alternatif yang benar-benar anti-Stalinis mulai dapat berjalan. Para pemimpin Yugoslavia harus melegitimasi perubahan ideologis mereka. Tampaknya mereka melihat kembali upaya-upaya sebelumnya untuk melembagakan manajemen-diri (seperti - Komune Paris serta "Negara dan Revolusi" Lenin dan sejenisnya.

Periode retrospeksi, introspeksi, dan inovasi ini menyebabkan ditinggalkannya program kolektivisasi paksa top-down, dan memuncak pada undang-undang pertama (tahun 1950) yang mengarah pada sosialisasi sebagian besar industri yang dinasionalisasi Negara. Ini didahului dengan pembentukan dewan pekerja pertama pada tahun 1949 di kota Solin, Kroasia.

Selain dewan pekerja, upaya untuk melembagakan manajemen-diri pekerja diperluas ke komite lokal, dan juga sebagian ke komite administratif di lembaga pendidikan, budaya, ilmiah, kesehatan, dan sosial lainnya. Pada bagian tulisan ini bukan tempat untuk membahas semua bentuk kelembagaan ini secara rinci, tetapi beberapa kata tentang apa yang disebut "manajemen mandiri - pekerja" sudah cukup lengkap dijelaskan.

Dewan pekerja terdiri dari delegasi pekerja, tetapi mereka tidak berdiri sendiri. Mereka seharusnya mengelola bersama dengan para spesialis dan manajer perusahaan yang dipilih oleh seluruh pekerja melalui konsensus, – dalam pembagian kerja normatif – seharusnya melaksanakan keputusan dewan pekerja, dan menangani fungsi perusahaan sehari-hari.

Dalam kondisi baru ini, Yugoslavia memulai rekonstruksinya dan segera mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang fantastis, transformasi dari semi-koloni pedesaan yang miskin menjadi negara industri yang sedang berkembang dan sangat mandiri (walaupun dengan ketidaksetaraan dan kesenjangan regional yang masih mengakar). Namun, peningkatan besar-besaran dalam standar hidup dicapai di bidang-bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, hak-hak pekerja dan jaminan sosial, dll. Kesejahteraan sosial, perawatan kesehatan yang disosialisasikan, dan perumahan yang disosialisasikan berada pada tingkat kelas dunia. Faktanya, Yugoslavia memiliki tingkat hak pekerja tertinggi di dunia, meski tentu saja bukan menjadi standar hidup tertinggi.

Sangat penting untuk dicatat bahwa pembangunan Yugoslavia mengilustrasikan kemungkinan pencapaian tingkat produktivitas yang sangat tinggi dalam sistem pasca-kapitalis. Pada tahun 1960-an, Yugoslavia memiliki tingkat pertumbuhan PDB tertinggi setelah Jepang. Ini jelas merupakan argumen yang sangat bagus melawan mereka yang mengklaim bahwa demokrasi industri atau partisipasi pekerja entah bagaimana "tidak efektif" atau "utopia menuju kesejahteraan".

Batasan Demokrasi

Saya telah menyebutkan beberapa faktor obyektif dan subyektif yang menghalangi sistem manajemen-diri pekerja yang lebih konsisten. Sekarang saya akan mempertimbangkannya dalam istilah yang lebih konkret.

Pertama, ekonomi demokratis yang relatif partisipatif di tingkat perusahaan berfungsi (dapat berjalan) dalam sistem monopoli politik otoriter yang lebih luas. Ini adalah kontradiksi mendasar dari sistem Yugoslavia, dan alasan mengapa tuntutan demokratisasi politik yang lebih langsung menjadi pusatnya. Namun, konseptualisasi kelas dari demokratisasi ini akhirnya digantikan oleh desentralisasi birokrasi nasionalis yang tidak mempertanyakan posisi elit politik dan birokrasi.

Terlepas dari beberapa upaya yang meragukan, partai dan mesin negara tidak melikuidasi dirinya sendiri, dan tidak ada kekuatan lain dalam masyarakat yang diizinkan atau mampu melakukan pekerjaan ini untuk mereka.

Kedua, dan terkait dengan ini, metode sosial dan demokratisasi ekonomi tetap direncanakan dan diarahkan dari atas, bukan oleh gerakan demokrasi langsung dari bawah. Kebenaran yang disayangkan adalah – dengan mempertimbangkan tingkat kesadaran kelas yang rendah dan self-organization populer – tidak ada orang lain selain Partai Komunis yang dapat melakukannya.

Implikasi paternalistik dari hal ini membuat pengembangan kesadaran demokrasi yang mengatur diri sendiri menjadi lebih sulit. Aspek yang sangat penting dari masalah ini adalah kenyataan bahwa serikat pekerja tidak memiliki peran sebagai organizer yang independen dan agresif, tetapi dipahami sebagai semacam “sabuk transmisi” untuk partai dan rezim.

Sebenarnya tidak ada oposisi sosialis dan keberagaman faksi yang serius dalam kehidupan politik, sosial dan budaya, tidak ada media bebas (konvensional) – apalagi bentuk produksi dan regulasi media yang partisipatif dan demokratis. Masalah yang menyertainya adalah bahwa para pekerja sering kali tidak menyadari – atau karena alasan lain .. gagal menggunakan – hak-hak yang mereka miliki, sehingga misalnya; satu studi tentang pengambilan keputusan komite lokal menemukan bahwa sekitar 98% dari proposal (gagasan) adalah diajukan oleh birokrasi .. yang selanjutnya akan diterima oleh apa disebut sebagai "manajer mandiri" - dipilih oleh pekerja.

Demikian pula, warga negara memiliki hak untuk menarik kembali pejabat terpilih, tetapi mereka tidak pernah menggunakannya! Karena masih terbelakangnya kesadaran kelas.

Ketiga, sifat terbelakang dari kekuatan produktif obyektif dan subyektif memperkuat posisi birokrat dan direktur di perusahaan, yang secara de facto memimpin perusahaan, bukan dewan pekerja, yang hanya memiliki fungsi kontrol. Keadaan ini diperkuat oleh situasi di mana para spesialis lebih erat berhubungan dengan lapisan manajerial yang stabil – seringkali didukung dari balik layar dengan kuat oleh partai – dan para spesialis ini tidak benar-benar dikendalikan oleh dewan-dewan pekerja yang sering berganti-ganti.

Jadi dewan pekerja jarang sekali dalam posisi untuk menyarankan rencana ekonomi alternatif yang bertentangan dengan rencana yang diajukan oleh para manajer dan spesialis mereka. Bersamaan dengan itu, birokrasi negara dan lapisan manajerial terus memonopoli reproduksi yang diperpanjang, sehingga tingkat eksploitasi justru tumbuh di tahun 70-an dan 80-an.

Dalam penelitiannya, Profesor Josip Obradovic menyimpulkan (melalui sekumpulan indikator empiris) bahwa kekuatan dan pengaruh lapisan manajerial 200 kali lebih besar daripada kekuatan pekerja di bagian produksi. Ketidaksetaraan kekuatan ini menjadi semakin mengakar pada tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Sebagian besar perwakilan di parlemen nasional dan Majelis Federal adalah anggota partai, di bawah bimbingan ketat dari peringkat teratas birokrasi partai. Manajer perusahaan dan politisi lokal, meskipun tidak selalu secara formal sebagai anggota partai, tanpa sadar telah dimanipulasi di belakang layar oleh mesin Partai Komunis, meskipun partai seharusnya menghapuskan diri sebagai badan administratif, dan diganti namanya menjadi "Liga Komunis" pada tahun 1952.

Keempat, mentalitas pedesaan yang patriarki juga membatasi perkembangan budaya politik yang demokratis. Sebagian sebagai manifestasinya, partisipasi siswa dan murid dalam pengambilan keputusan tidak pernah dipertimbangkan secara serius untuk sekolah dasar dan menengah.

Hal yang sangat bodoh untuk mengharapkan bahwa murid-murid, yang tidak dididik di sekolah demokrasi, entah bagaimana akan secara ajaib menjadi individu-individu yang mengatur dirinya sendiri setelah dididik dan disiplinkan untuk tetap menjadi patuh selama bertahun-tahun dalam periode paling formatif dari perkembangan pribadi dan sosial mereka sehari-hari.

Kelima, sebagian besar populasi secara efektif dikecualikan dari proses manajemen-diri pekerja. Ini jelas terjadi pada penduduk pedesaan. Pengecualian satu-satunya adalah jenis pengambilan keputusan kooperatif yang sangat mendasar dalam komite desa setempat. Selain itu, tentara dan partai juga dikecualikan dari proses demokrasi, atau bahkan kontrol

demokrasi dari bawah. Agak paradoks, sifat hierarkis hubungan internal partai – dan hubungannya dengan masyarakat – mendiskreditkan gagasan pemerintahan sendiri di mata penduduk. Itu juga memudahkan birokrat dan nasionalis seperti Milosevich untuk memonopoli lembaga-lembaga ini.

Perhatian yang tidak memadai (sebagian dapat dimengerti mengingat keharusan mengejar waktu untuk mengumpulkan - mengakumulasikan kekayaan dan meningkatkan standar material dasar kehidupan) juga diberikan pada penciptaan budaya humanis baru, dan pada penciptaan budaya manajemen-diri pekerja. Saya mengacu baik pada "budaya" seperti yang umumnya dipahami dan terutama dalam pengertian Gramscian yang lebih luas tentang "budaya terintegrasi" dan civiltà.

Budaya adalah inti dari pemecahan pembagian kerja kelas yang kaku dalam dua cara mendasar. Pertama, keharusan meningkatkan tingkat pendidikan demokrasi, kebutuhan dan aspirasi pekerja .. warga negara. Kedua, karena pemerintahan sendiri tidak dapat dipertahankan kecuali diperluas ke reproduksi demokratis dari hegemoni budaya sosialis baru yang mendukung pengorganisiran mandiri manajemen-diri pekerja.

Namun, ketika keprihatinan nasionalis mengemuka, beban (budaya) masa lalu yang penuh kekerasan muncul kembali dengan sepenuh hati dikepala. Bukannya melakukan ideologisasi ulang - pendidikan demokrasi secara luas dan masif, justru berbalik melakukannya dengan melawan fasisme melalui metode fasis (seperti yang dibuktikan secara khusus dalam pengadilan militer dan eksekusi massal pasca-perang), dan Stalinisme melalui metode Stalinis (misalnya kamp konsentrasi Goli Otok), rezim baru Yugoslavia dibuat tersembunyi, di bawah tanah (dan tentu saja awalnya minoritas) .. Sub-kultur kebencian dan

ketidakpercayaan. Reaksi nasionalis dan pro-kapitalis ini semakin menggerus posisi nilai-nilai humanistik dalam masyarakat.

Serangkaian masalah tambahan berkaitan dengan masalah pasar. Di satu sisi, perusahaan seringkali tidak memiliki otonomi pasar. Ada banyak kontrol politik paternalistik top-down atas perusahaan, dan pemerintah memiliki kebiasaan berisiko menyosialisasikan kerugian yang dibuat oleh perusahaan yang tidak produktif. Ini berarti bahwa para pekerja seringkali tidak secara langsung bergantung pada keputusan "otonom" mereka, ..

yang mengikis tanggung jawab mereka dan akibatnya motivasi dan minat intrinsik mereka untuk membantu diri mereka sendiri – yaitu mengurangi komitmen mereka terhadap kebebasan melalui pemerintahan sendiri.

Di sisi lain, marketisasi yang cepat dan kurangnya kohesi antara unit-unit ekonomi "otonom" yang berbeda (terutama sejak akhir 1960-an) menyebabkan ketidaksetaraan baru, utang luar negeri yang sangat besar melalui pinjaman yang ceroboh, inflasi, kekurangan barang, perumahan, dll.

Prinsip-prinsip pasar juga mendorong kepentingan pribadi dan persaingan antar perusahaan, konsumerisme dan penyebaran pengaruh ekonomi, politik dan ideologis Barat, juga kekacauan yang disebabkan oleh pemerasan IMF. Dikombinasikan dengan masalah "xenomania" yang berkembang (dalam bentuk pemujaan dan persaingan yang semakin tidak kritis terhadap kapitalis Barat yang maju), kesulitan ekonomi ini dengan kuat menegaskan kembali masalah "sosialisme di satu negara". Mengenai perdebatan atas sistem pasar, beberapa penulis (seperti Catherine Samary) telah memetakan kemungkinan bahwa "sintesis yang lebih tinggi"

dari perencanaan dan inisiatif dapat dicapai melalui perencanaan demokrasi partisipatif yang terdesentralisasi.

Yugoslavia bahkan menetapkan beberapa bentuk perencanaan terdesentralisasi melalui komunikasi ekonomi berkelanjutan dan perencanaan bersama antara delegasi (manajer profesional) organisasi ekonomi dan sosial, yang memungkinkan pengumpulan informasi permintaan dan penawaran yang lebih cepat dan tidak terlalu merusak daripada yang dapat disediakan oleh pasar. Bentuk perencanaan terdesentralisasi seperti itu dan lainnya dapat menawarkan banyak keuntungan yang dimiliki sistem pasar dibandingkan perencanaan terpusat yang birokratis, tetapi kekurangan sering kali mendaratkan tamparan keras di wajah bahwa ekonomi dan masyarakat masih diberikan - digerakan oleh "tangan tak terlihat"-nya.

Jalan ketiga antara perencanaan terpusat dan "sosialisme pasar" konvensional ini hanya tinggal kemungkinan abstrak, seperti prospek sosialisme demokratis pada umumnya.

Demokratisasi sejati melalui perjuangan sosial dari bawah tidak terlalu realistis mengingat tidak adanya oposisi politik dan serikat buruh progresif terorganisir terhadap rezim dan sistem yang ada. Kaum komunis dan sosialis Yugoslavia gagal menghargai bahwa dinamisme sistemik internal melalui keberagaman faksi politik, sosial dan budaya adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan keberlanjutan jangka panjang dari tatanan baru pasca-kapitalis. Praktik keberademokrasi partisipatoris sejati sebenarnya adalah jalan yang paling sesuai untuk mencapai pembangunan sosial yang egaliter.

Ringkasnya, percobaan "mandiri" Yugoslavia tidak cukup integral atau terikat secara organik dengan massa. Namun, itu adalah upaya jangka panjang yang paling komprehensif untuk membangun pemerintahan sendiri yang populer dalam sejarah.

Dengan demikian, analisisnya merupakan titik awal yang sangat berguna untuk masa depan hari ini.*

Notes

Jakopovic, I., Eksploatacija i kraj socijalizma (Exploitation and the End of Socialism), 1989, unpublished manuscript

Kardelj, E., Pravci razvoja politi?kog sistema socijalisti?kog samoupravljanja (The Paths of Development of the Socialist Political System of Self-Government), Belgrade, 1977

Obradovic, J., Distribucija participacije (Distribution of Participation), Revija za sociologiju, No.1, 1972

Samary, C., Plan, market and democracy: The experience of the so-called socialist countries, International Institute for Research and Education, Amsterdam, 1988

Bacaan lainnya tentang Manajemen-diri dan Sosialisme Pasar Yugoslavia;

The Yugoslav Experiment With Self-Governing Market Socialism - Chen Lanyan

***

Diambil dari ABC+ Kontrol Pekerja

(yang dipublikasi pada April 2023)

Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)